



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-202
KE PROVINSI JAWA BARAT BARAT**

*

**

**

*

JAKARTA 2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI JAWA BARAT

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 13 Juli 2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Agustus 2021.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jawa Barat adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jawa Barat adalah untuk:

1. Melihat dan mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat,

serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Jawa Barat, terutama terkait:

- a. Permasalahan Program Citarum Harum, Km 0 Cisanti, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Bandung;
 - b. Permasalahan Budidaya Tanaman Hortikultura di Kertasari, Kabupaten Bandung;
 - c. permasalahan Budi Daya Ikan Mas Majalaya di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
2. Menyerap aspirasi para pemangku kepetingan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), dengan susunan tim terlampir.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 8-12 Oktober 2021 dan bertempat di Kabupaten Bandung.

B. GAMBARAN UMUM

1. Kabupaten Bandung

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung yang terletak pada koordinat 107° 22' - 108° 50' Bujur Timur dan 6° 41' - 7° 19' Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung 176.238,67 Ha, sebagian besar wilayah Bandung berada diantara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi Kabupaten Bandung, seperti disebelah utara terletak Bukittunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m yang

berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah:

- ✓ Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
- ✓ Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;
- ✓ Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Dengan Morfologi wilayah pegunungan dengan rata-rata kemiringan lereng antara 0-8%, 8-15% hingga di atas 45%. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 120 C sampai 240 C dengan kelembaban antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau.

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 3.215.548 jiwa pada tahun 2010 (Data BPS 2010), terdiri dari laki-laki sebanyak 1.638.623 jiwa (50,96%) dan perempuan sebanyak 1.576.925 jiwa (49,04%). Jumlah ini meningkat 1,35% dibandingkan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai lk 3.172.860 jiwa, terdiri atas: laki-laki 1.590.399 jiwa (50,13%) dan perempuan 1.582.461 jiwa (49,87%). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2010, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89%, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17% dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94%. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan sebesar 2,25%, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) menurun 0,44%,

sedangkan jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) meningkat 2,69%.

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terdapat angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 54,10%, ini artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung lk. 54 orang penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, *dependency ratio* pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,15 poin, sedangkan *dependency ratio* pada tahun 2009 sebesar 48,95%. Angka Ketergantungan (*dependency ratio*) diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, dengan meningkatkan Daya saing dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Bandung.

2. **Proyek Citarum Harum**

Dengan daerah aliran sungai seluas 690.571,57 hektar, Citarum menjadi sumber air irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan sumber air baku untuk air minum serta sebagai lahan perikanan tangkap dan budi daya yang dimanfaatkan penduduk di 10 kabupaten dan dua kota di Provinsi Jawa Barat. Namun Citarum hari ini dihadapkan pada pencemaran akut yang mengakibatkan kerugian besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, dan sumber daya lingkungan.

Diawali oleh sebuah kenyataan bahwa pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Maka, pemerintah menganggap perlu diambil langkah-langkah percepatan yang strategis secara terpadu untuk melakukan pengendalian dan penegakan hukum, guna pemulihan DAS Citarum.

Atas fakta tersebut, pada 14 Maret 2018, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Untuk melaksanakan percepatan Pengendalian dan Kerusakan DAS Citarum secara terpadu, melalui Perpres ini, pemerintah membentuk Tim

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, yang selanjutnya disebut Tim DAS Citarum.

Pasal 3 ayat (1) Perpres 15 Tahun 2018, Tim DAS Citarum bertugas melaksanakan percepatan pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan pengendalian DAS Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum, yang dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Termasuk optimalisasi personel dan peralatan operasi. Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Tim DAS Citarum adalah Mendagri, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menristekdikti, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Kabinet, dan Kepala BPKP.

3. Hortikultura Kabupaten Bandung

Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan tanaman hias menjadi andalan mata pencaharian petani Kabupaten Bandung. Beberapa daerah yang menjadi sentra produksi komoditas hortikultura antara lain, Kecamatan Pangalengan, Cimenyan, Kertasari, Pacet, Arjasari, Ciwidey, Pasirjambu dan Rancabali. Sementara itu, komoditas yang paling banyak diusahakan meliputi kentang, kubis, wortel, seledri, bawang merah, cabai (besar dan rawit), kembang kol, tomat, selada, osin, stroberi dan sekarang tanaman hias.

Beberapa daerah sentra produksi juga sudah diusahakan komoditas-komoditas eksklusif yang umumnya dipasarkan di pasar-pasar swalayan komoditas tersebut antara lain paprika, tomat, cherry, timun jepang, terung, *baby corn*, kobuca dan kailan.

Diharapkan tanaman empat musim bisa ditanam di Kabupaten Bandung. Kunci membawa Bandung sebagai kabupaten sentra pertanian adalah benih berkualitas. Petani dibantu dengan benih hortikultura berkualitas. Termasuk komoditas pertanian lainnya dan agar petani bersemangat.

Diyakini Indonesia sebagai negara agraris mampu maju dengan komoditas pertanian. Kuncinya adalah pembinaan kepada para petani.

Dengan membangun pertanian, petani diuntungkan dan negara lebih kuat karena ditopang pangan yang mencukupi. Tidak hanya produk segar, Kabupaten Bandung fokus dengan produk pertanian olahan berbasis teknologi. Produk Hortikultura Bandung telah mampu menembus pasar Singapura dan Hongkong. Peluang ini bisa ditangkap kaum milenial.

4. **Budi Daya Ikan Mas Majalaya**

Ikan Mas Majalaya (*Cyprinus Carpio*) adalah jenis ikan mas yang pertama kali dirilis pada tahun 1999 oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Ikan Mas Majalaya ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/IK.120/7/1999, menjadi jenis ikan baru yang dapat dibudidayakan dengan keunggulan yaitu pertumbuhannya yang relatif cepat serta tahan terhadap bakteri *Aeromonas hydrophila*.

Varietas Majalaya merupakan ikan mas yang paling banyak dibudidayakan karena memiliki keunggulan-keunggulan baik secara fisik, fisiologis maupun genetik karena varietas Majalaya merupakan galur murni yang potensial. Ikan ini pertama dikembangkan di daerah Majalaya dan pemeliharaan dapat dilakukan pada berbagai skala dan tingkat teknologi, mulai dari yang bersifat ekstensif di kolam-kolam tanah sampai yang bersifat intensif di kolam air deras maupun keramba jaring apung, Varietas Majalaya merupakan galur murni yang potensial. Ke depan diharapkan menghasilkan benih unggul dan dapat terus dikembangkan.

Kegiatan Pembenihan Ikan Mas Majalaya oleh kelompok Tunas Mandiri Lestari diharapkan dapat terus menerapkan persyaratan standard kualitas produksi induk unggul dan benih bermutu melalui penerapan Cara Perbenihan Ikan Yang Baik (CPIB) sehingga menghasilkan indukan-indukan unggul untuk nantinya dapat dimanfaatkan bagi para pembudi daya. bagi pembudi daya yang berada kawasan budi daya di Kecamatan Ciparay mampu mengelola produksi budidaya dengan baik, terorganisir dan tetap menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

IV. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. KUNJUNGAN KE PROYEK CITARUM HARUM

1. Komisi IV DPR RI menilai wilayah hutan di sekitar Sungai Citarum sudah banyak yang gundul. Menurutnya perlu ada keseriusan bersama seluruh pihak pihak untuk mewujudkan Citarum Harum, dalam hal ini untuk revitalisasi dan rehabilitasi Sungai Citarum, termasuk penanganan pencemaran dan penghijauan kembali sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut.
2. Perlu adanya keseriusan untuk segera dilakukan penanaman pohon. Tetapi juga harus dipastikan tentang jaminan kesejahteraan masyarakat lokal yang berada pada wilayah ini, yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani sayur mayur di kawasan Sungai Citarum, dan cenderung enggan menanam tanaman keras untuk meminimalisir potensi erosi. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang masih rendah membuat kesadaran masyarakat terhadap memelihara tanaman keras menjadi rendah.
3. Selanjutnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke Sungai Citarum belum terbangun dengan baik, karena banyak juga masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dilakukan industri. Hal ini perlu dibangun secara bersama-sama, dengan langkah taktis, dan dikawal langsung sampai tingkat teknis.
4. Berdasarkan dialog bersama pemerintah daerah serta diskusi yang menyerap aspirasi warga maupun pegiat lingkungan di Kertasari, diketahui bahwa saat ini Satgas Citarum melalui Pokja Penanganan Lahan Kritis telah dan terus melakukan reboisasi di dalam dan luar kawasan. Untuk di luar kawasan, terdapat upaya pembuatan agroforestri dan pembuatan persemaian serta Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP).

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di Sungai Citarum dan sekitarnya, untuk bersama melakukan pemetaan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Sungai Citarum dan

sekitarnya, termasuk didalamnya mendorong peran serta aktif BUMN dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan dan hutan serta peningkatan sarana prasarana di dalam dan di sekitar kawasan Km 0 Situ Cisanti.

2. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan RDPU dengan Gubernur Jawa Barat selaku penanggung jawab wilayah di sepanjang Sungai Citarum dan sekitarnya, dalam rangka meminta penjelasan mengenai permasalahan dan rencana aksi pengelolaan pengendalian kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan dan hutan di wilayah tersebut.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk menyiapkan anggaran untuk mendukung pengadaan unit truk pengangkut sampah di wilayah Km 0 Situ Cisanti dan sekitarnya.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan dan hutan di wilayah sepanjang Sungai Citarum dan sekitarnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait berwenang lainnya dalam rangka melaksanakan target pengendalian kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan dan hutan di wilayah sepanjang Sungai Citarum dan sekitarnya.

B. KUNJUNGAN KE LOKASI HORTIKULTURA DI SEKITAR SITU CISANTI

Pada kunjungan tersebut terdapat informasi terkait dengan masalah hortikultura yang disampaikan oleh para petani sayuran dan petugas penyuluh pertanian yang mendampinginya, yaitu antara lain:

1. Petani sayuran kerap kali sulit untuk mendapatkan benih sayuran yang bermutu. Benih sayuran yang bermutu selain harganya tinggi pada umumnya juga diproduksi oleh perusahaan besar.

Pada kesempatan tersebut petani mengusulkan didorong dan didukung untuk menghasilkan benih secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemitraan untuk menghasilkan benih dengan harga dan mutu

yang baik diusulkan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah benih tersebut.

2. Meskipun pada saat kunjungan harga sayuran ditingkat petani relatif cukup baik, akan tetapi petani kerap kali mendapatkan harga yang sangat rendah dan kejenuhan pasar untuk menyerapnya. Perlu ada sebuah mekanisme yang dapat menstabilkan dan melindungi harga-harga sayuran. Petani meminta agar dibantu penyelesaian masalah usaha tani dengan bantuan sarana panen dan pasca panen agar hasil panennya dapat disimpan lebih lama dan dengan biaya produksi yang tidak mahal.
3. Petani meminta dibantu dalam upaya pemasarannya dan menjaga agar harga tidak fluktuatif di tingkat di tingkat petani dan melarang impor pada saat panen, agar harga di tingkat petani tidak merugikan petani.
4. Jumlah penyuluh yg melayani petani jumlahnya kurang dan yang tersisa sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) pada usia menjelang pensiun. Para penyuluh Tenaga Harian Lepas sangat berharap statusnya dapat ditingkatkan menjadi ASN atau Pegawai Negeri dengan perjanjian kerja. Kecilnya biaya operasional untuk kegiatan penyuluhan juga menyebabkan penyuluh sulit untuk menjangkau dan memberikan penyuluhan secara optimal.
5. Masalah pupuk menjadi masalah yang masih menyulitkan petani sayuran. Pemberlakuan Kartu Tani kerap kali menyulitkan petani karena faktor usia dan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kewajiban agar kartu tani dapat dipergunakan dengan penetapan bahwa harus ada saldo minimum juga menyulitkan.
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung mengusulkan agar ada perbaikan Kantor Penyuluh di setiap kecamatan yang sudah memprihatinkan kondisinya, agar mampu mendukung kinerja penyuluh secara maksimal.

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI mendorong dan mendukung agar petani dapat menghasilkan benih secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya Komisi IV meminta Kementerian Pertanian beserta instansi terkait berwenang untuk melakukan program kemitraan untuk

menghasilkan benih dengan harga dan mutu yang baik, yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah benih tersebut.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk membantu menyelesaikan permasalahan usaha tani dengan bantuan sarana panen dan pascapanen agar hasil panen petani dapat disimpan lebih lama dengan biaya produksi yang tidak mahal.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk membantu menyelesaikan permasalahan pemasaran produk hortikultura dan menjaga agar harga di tingkat petani tidak fluktuatif. Selanjutnya Komisi IV DPR RI melarang adanya impor produk hortikultura pada saat panen, agar harga di tingkat petani tidak merugikan petani.
4. Komisi IV DPR RI mendorong agar para penyuluh Tenaga Harian Lepas dapat ditingkatkan statusnya menjadi Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negeri dengan perjanjian kerja. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan biaya operasional untuk kegiatan penyuluhan agar penyuluh dapat memberikan penyuluhan secara optimal.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian pertanian dapat melakukan kajian terkait bantuan pupuk serta pelaksanaan Program Kartu Tani yang saat ini dirasa masih menyulitkan para petani.
6. Komisi IV DPR RI mendorong penyediaan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana Kantor Penyuluh di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung agar mampu mendukung kinerja penyuluh secara maksimal.

C. KUNJUNGAN KE LOKASI BUDI DAYA IKAN MAS MAJALAYA DI KECAMATAN CIPARAY, KABUPATEN BANDUNG

1. Keberadaan ikan mas strain Majalaya ternyata masih bertahan. Ini terlihat masih adanya pembudi daya segmen pembenihan ikan mas tersebut yang tergabung dalam Kelompok Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Tunas Mandiri Lestari Kampung Cipaku, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Produksinya benih mencapai 1 juta ekor per bulan.

2. Permasalahan yang dihadapi dalam budi daya Ikan Mas Majalaya di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Alih fungsi lahan sawah dan kolam pendederan menjadi perumahan menyebabkan hilangnya satu segmentasi mata rantai produksi setelah pembenihan yaitu pendederan (ukuran 4-6 cm). Hal ini menyebabkan para pembudidaya kesulitan menyalurkan produksi pembenihan ikan dengan ukuran 1-3 cm.
 - b. Penurunan kuantitas dan kualitas air akibat adanya persaingan pemanfaatan air antara pembudidaya ikan dengan limbah rumah tangga dan PDAM.
 - c. Area pembesaran semakin berkurang, khususnya di Kermaba Jaring Apung (KJA).
 - d. Biaya pakan pabrikan masih cukup tinggi sehingga margin keuntungan berkurang.
3. Beberapa solusi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian permasalahan budidaya ikan mas Majalaya adalah sebagai berikut:
 - a. Intensifikasi pembenihan dan pendederan, selain akan mengurangi jumlah penggunaan air, juga akan meningkatkan produktivitas kolam. Intensifikasi pembenihan dapat dilaksanakan dengan peningkatan kepadatan penebaran ikan dan penggunaan aerasi serta pemanfaatan probiotik semisal sistem bioflok atau kolam ikan mas dengan kincir atau menghidupkan kembali usaha kolam ikan deras.
 - b. Bimbingan teknis terkait teknologi dan manajemen usaha pembudidaya ikan yang terus menerus melalui sinergi BRSDMKP, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Dinas Kelautan Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c. Diversifikasi produk produk hasil pendederan ikan mas menjadi *baby fish* perlu dipelajari kemungkinannya jika hasil pembenihan/pendederan sulit disalurkan ke pembesaran ikan di kolam atau karamba.
 - d. Penambahan porsi pemberian pakan alami dan pakan buatan mandiri dalam rangka mengurangi kebutuhan biaya penggunaan pakan pabrikan.

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi semangat dan konsistensi Kelompok Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Tunas Mandiri Lestari Kampung Cipaku, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan budi daya Ikan Mas Majalaya.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus memberikan bimbingan teknis kepada para pembudi daya ikan, terutama pembudi daya Ikan Mas Majalaya.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan revitalisasi unit pembenihan melalui penambahan sarana produksi, pelaksanaan *biosecurity* dan perbaikan kolam.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan penyaluran bantuan calon induk dan percontohan bioflok, serta bahan baku pakan mandiri.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan Sertifikasi pada pelaksanaan budidaya Ikan Mas Majalaya terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

V. KESIMPULAN

- A. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di Sungai Citarum dan sekitarnya, untuk bersama melakukan pemetaan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Sungai Citarum dan sekitarnya, termasuk didalamnya mendorong peran serta aktif BUMN dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan dan hutan serta peningkatan sarana prasarana di dalam dan di sekitar kawasan Km 0 Situ Cisanti.
- B. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan RDPU dengan Gubernur Jawa Barat selaku penanggung jawab wilayah di sepanjang Sungai Citarum dan sekitarnya, dalam rangka meminta penjelasan mengenai permasalahan dan

rencana aksi pengelolaan pengendalian kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan dan hutan di wilayah tersebut.

- C. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk menyiapkan anggaran untuk mendukung pengadaan unit truk pengangkut sampah di wilayah Km 0 Situ Cisanti dan sekitarnya.
- D. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan dan hutan di wilayah sepanjang Sungai Citarum dan sekitarnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait berwenang lainnya dalam rangka melaksanakan target pengendalian kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan dan hutan di wilayah sepanjang Sungai Citarum dan sekitarnya.
- E. Komisi IV DPR RI mendorong dan mendukung agar petani dapat menghasilkan benih secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya Komisi IV meminta Kementerian Pertanian beserta instansi terkait berwenang untuk melakukan program kemitraan untuk menghasilkan benih dengan harga dan mutu yang baik, yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah benih tersebut.
- F. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk membantu menyelesaikan permasalahan usaha tani dengan bantuan sarana panen dan pascapanen agar hasil panen petani dapat disimpan lebih lama dengan biaya produksi yang tidak mahal.
- G. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk membantu menyelesaikan permasalahan pemasaran produk hortikultura dan menjaga agar harga di tingkat petani tidak fluktuatif. Selanjutnya Komisi IV DPR RI melarang adanya impor produk hortikultura pada saat panen, agar harga di tingkat petani tidak merugikan petani.
- H. Komisi IV DPR RI mendorong agar para penyuluh Tenaga Harian Lepas dapat ditingkatkan statusnya menjadi Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negeri dengan perjanjian kerja. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan biaya operasional untuk kegiatan penyuluhan agar penyuluh dapat memberikan penyuluhan secara optimal.
- I. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian pertanian dapat melakukan kajian terkait bantuan pupuk serta pelaksanaan Program Kartu Tani yang saat ini dirasa masih menyulitkan para petani.

- J. Komisi IV DPR RI mendorong penyediaan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana Kantor Penyuluh di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung agar mampu mendukung kinerja penyuluh secara maksimal.
- K. Komisi IV DPR RI mengapresiasi semangat dan konsistensi Kelompok Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Tunas Mandiri Lestari Kampung Cipaku, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan budi daya Ikan Mas Majalaya.
- L. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus memberikan bimbingan teknis kepada para pembudi daya ikan, terutama pembudi daya Ikan Mas Majalaya.
- M. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan revitalisasi unit pembenihan melalui penambahan sarana produksi, pelaksanaan *biosecurity* dan perbaikan kolam.
- N. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan penyaluran bantuan calon induk dan percontohan bioflok, serta bahan baku pakan mandiri.
- O. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan Sertifikasi pada pelaksanaan budidaya Ikan Mas Majalaya terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 Oktober 2021

Ketua Tim,

Ttd.

H. Dedi Mulyadi, S.H.

A-294

